

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Sukodono Tahun 2021 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2021, pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp 0,- dengan realisasi sebesar Rp 0,- terinci sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2021

dalam rupiah

Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%	Pelampauan Target	%
1	2	3	4	5=3/2	6=3-2	7=6/2
	NIHIL					
Total Pendapatan Asli Daerah						

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PAD Tahun 2017 s/d 2021

Jenis Pendapatan	2017	2018	2020	2020	2021
	NIHIL				

(BERIKAN URAIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPERJELAS KENAIKAN (PENURUNAN) PENDAPATAN PADA TABEL TERSEBUT.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Sukodono meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.749.209.992,00	1.734.445.286,00	99,16	14.764.706,00
2	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.042.101.443,00	1.734.445.286,00	99,16	14.764.706,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2020	2020	2021
Belanja Pegawai	312.044.108,00	1.131.238.863,00	1.410.461.404,00	1.462.792.334,00	1.163.782.711,00
Belanja Barang	618.351.295,00	805.283.259,00	841.278.777,00	566.603.527,00	570.662.575,00
Belanja Modal	131.014.000,00	97.850.000,00	153.247.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.061.409.403,00	2.034.372.122,00	2.404.987.181,00	2.029.395.861,00	1.734.445.286,00
% Kenaikan / Penurunan		91,67%	18,22%	-15,62%	-14,53%

Perkembangan Realisasi Belanja Operasi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 2.4 sehingga perlu kami beri penjelasan sebagai berikut:

- Tahun 2018 ada kenaikan sebesar 91,67% dari tahun 2017 dikarenakan kebutuhan belanja tiap tahun semakin meningkat dengan harga juga semakin mahal dan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna melengkapi kebutuhan kantor agar pelaksanaan pelayanan lebih maksimal.
- Pada tahun anggaran 2020 ada kenaikan 18,22% dari tahun 2018 disebabkan adanya tunjangan TPP untuk PNS yang sebelumnya berupa tunjangan tambahan uang makan berubah menjadi tambangan perbaikan penghasilan (TPP) .
- Pada tahun anggaran 2020 ada penurunan sebesar 15,62% dari tahun 2020 disebabkan adanya masa pandemi COVID-19 sehingga terjadi pengurangan anggaran operasional kantor atau *self blocking* untuk dialihkan kepada anggaran penanganan pandemi COVID-19.
- Pada tahun anggaran 2021 ada penurunan sebesar 14,53% dari tahun 2020 disebabkan adanya masa pandemi COVID-19 sehingga terjadi pengurangan anggaran operasional kantor atau *self blocking* untuk dialihkan kepada anggaran penanganan pandemi COVID-19.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Program 1 : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
- Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	2.320.000,00	2.318.000,00	Realisasi digunakan untuk:
				- Belanja Foto Copy / Penggandaan 100.000,00
				- Belanja Lembur 2.218.000,00
JUMLAH		2.320.000,00	2.318.000,00	

Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	3.060.000,00	3.044.000,00	Realisasi digunakan untuk:
				- Belanja Foto Copy / Penggandaan 100.000,00
				- Belanja Lembur 2.944.000,00
JUMLAH		3.060.000,00	3.044.000,00	

Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	1.580.000,00	1.570.000,00	Realisasi digunakan untuk:
				- Belanja Foto Copy / Penggandaan 100.000,00
				- Belanja Lembur 1.470.000,00
JUMLAH		1.580.000,00	1.570.000,00	

Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan	
1	BELANJA PEGAWAI	1.149.605.237,00	1.143.580.911,00	Realisasi digunakan untuk:	
				- Belanja Gaji Pokok	578.825.157,00
				- Belanja Tunjangan Keluarga	66.757.014,00
				- Belanja Tunjangan Jabatan	63.440.000,00
				- Belanja Tunjangan Fungsional Umum	12.310.000,00
				- Belanja Tunjangan Beras	35.920.320,00
				- Belanja Tunjangan PPh	1.147.058,00
				- Belanja Pembulatan Gaji	4.926,00
				- Belanja Iuran JKK	1.174.118,00
				- Belanja Iuran JKM	3.522.421,00
				- Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja (TPP)	380.479.897,00
JUMLAH		1.149.605.237,00	1.143.580.911,00		

Sub Kegiatan 5 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA PEGAWAI	20.726.800,00	20.201.800,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Honorarium Penanggungjawab Keuangan 20.201.800,00
2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.440.000,00	4.422.000,00	- Belanja Lembur PNS 4.422.000,00
JUMLAH		25.166.800,00	24.623.800,00	

Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 6 : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	3.600.000,00	3.600.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Lembur 3.600.000,00
JUMLAH		3.600.000,00	3.600.000,00	

Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 7 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	8.050.000,00	8.050.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja pakaian batik tradisional 8.050.000,00
JUMLAH		8.050.000,00	8.050.000,00	

Kegiatan 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 7 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	25.003.600,00	25.003.600,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja ATK 24.253.600,00 - Belanja Materai 750.000,00
JUMLAH		25.003.600,00	25.003.600,00	

Sub Kegiatan 7 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	4.940.750,00	4.940.750,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Cetak dan Penggandaan 4.940.750,00
JUMLAH		4.940.750,00	4.940.750,00	

Sub Kegiatan 8 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 - Belanja Perjadin Luar Daerah 3.800.000,00
JUMLAH		6.500.000,00	6.500.000,00	

Sub Kegiatan 8 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 - Belanja Perjadin Luar Daerah 3.800.000,00
JUMLAH		6.500.000,00	6.500.000,00	

Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan 8 : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	30.476.200,00	28.875.281,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Tagihan Air 832.400,00 - Belanja Tagihan Listrik 18.228.631,00 - Belanja Tagihan Internet 9.814.250,00
JUMLAH		30.476.200,00	28.875.281,00	

Sub Kegiatan 9 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	181.008.000,00	174.527.640,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Upah TKB 144.000.000,00 - Belanja Tambahan Upah 7.192.000,00 - Belanja Iuran BPJS Kesehatan 21.408.840,00 - Belanja Iuran JKK dan JKM 1.926.800,00
JUMLAH		181.008.000,00	174.527.640,00	

Kegiatan 7 : Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan 10 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	30.592.155,00	30.504.054,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Suku Cadang (Ban)3.200.000,00 - Belanja BBM, Servis dan Perpanjangan STNK27.304.054,00
JUMLAH		30.592.155,00	30.504.054,00	

Sub Kegiatan 11 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	5.600.000,00	5.600.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Servis Komputer5.600.000,00
JUMLAH		5.600.000,00	5.600.000,00	

Sub Kegiatan 12 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	6.947.250,00	6.947.250,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Pemeliharaan Gedung6.947.250,00
JUMLAH		6.947.250,00	6.947.250,00	

Program 2 : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	2.700.000,00	2.700.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat2.700.000,00
JUMLAH		2.700.000,00	2.700.000,00	

Kegiatan 2 : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	900.000,00	900.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00
JUMLAH		900.000,00	900.000,00	

Program 3 : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	2.060.000,00	2.060.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 - Belanja Lembur 260.000,00
JUMLAH		2.060.000,00	2.060.000,00	

Sub Kegiatan 2 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	20.300.000,00	20.300.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 - Belanja Perjadin Dalam daerah 10.400.000,00
JUMLAH		20.300.000,00	20.300.000,00	

Program 4 : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan 1 : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	1.200.000,00	1.200.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Pengganti Tranport Forkopimcam 1.200.000,00
JUMLAH		1.200.000,00	1.200.000,00	

Program 5 : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan 1 : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan 1 : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
1	BELANJA BARANG JASA	237.600.000,00	237.600.000,00	Realisasi digunakan untuk: - Belanja Upah Korkam dan TPD 237.600.000,00
JUMLAH		237.600.000,00	237.600.000,00	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Sukodono selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2017	2018	2020	2020	2021
1. Aset	2.126.500.306,03	2.241.790.306,03	2.200.193.950,08	2.100.447.175,33	2.017.391.427,92
2. Kewajiban	3.324.764,00	30.153.000,00	44.314.953,00	35.655.972,00	37.971.063,00
3. Ekuitas	2.123.175.542	2.211.637.306	2.155.878.997,08	2.064.791.203,33	2.064.791.203,33
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.126.500.306,03	2.241.790.306,03	2.200.193.950,08	2.100.447.175,33	2.102.762.266,33

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh SKPD Kecamatan Sukodono terdiri dari: **NIHIL (karena bukan SKPD penghasil)**.

Rincian realisasi PAD tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.1 : Rincian Realisasi PAD tahun 2021 dan 2020

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2021	%	2020		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4(6	8=7/6
1			NIHIL				
2							
3							
4							
	Jumlah						

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang meliputi 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2021	%	2020		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Hotel						
2	Pajak Restoran		NIHIL				
3	Pajak Hiburan						
4	Pajak Reklame						
5	Pajak Penerangan Jalan						

6	Pajak Parkir						
7	Pajak Air Tanah						
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan						
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						
	Jumlah Pendapatan						

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

dalam rupiah

NO	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2021	%	2020		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan						
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan						
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						
4	Retribusi Pelayanan Pasar						
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor						
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi						
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang						
8	Retribusi pemakaian kekayaan daerah						
9	Retribusi Terminal						
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir						
11	Retribusi Rumah Potong Hewan						
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga						
13	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan						
14	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian						
15	Retribusi Ijin Trayek						
	Jumlah						

		Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(c)	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah tahun 2021 terinci dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pendapatan Lain - Lain PAD Yang Sah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

dalam rupiah

NO.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2021	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2021	% 5=4/3	2020		
1	2	3	4		6	7=4-6	8=7/6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan						
2	Penerimaan Jasa Giro						
3	Penerimaan Deposito						
4	Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah						
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan						
6	Pendapatan Denda Pajak						
7	Pendapatn Hasil Eksekusi Atas Jaminan						
8	Pendapatan dari Pengembalian						
9	Pendapatan BLUD RSUD Dr. Haryoto						
10	Pendapatan BLUD Akper Pemkab Lumajang						
11	Pendapatan Sewa						
12	Pendapatan dari Siaran						
13	Dana Kapitasi JKN						
14	Pendapatan Denda Sewa						
15	Sumbangan Pihak ke III						
16	Penerimaan Lain-lain						
17	Pendapatan Dana BOS						
18	Pendapatan Bunga Dana BOS						
	Jumlah						

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a. Belanja Daerah	1.749.209.992,00	1.734.445.286,00	2.029.395.861,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp 1.734.445.286,00 Realisasinya mencapai 99,16% dari anggaran sebesar Rp 1.749.209.992,00. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja daerah Tahun 2021 turun 14%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Operasi	1.749.209.992,00	1.734.445.286,00	2.029.395.861,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	1.170.332.037,00	1.163.782.711,00	99,44	1.462.792.334,00
2	Belanja Barang dan Jasa	578.877.955,00	570.662.575,00	98,58	566.603.527,00
	Jumlah	1.749.209.992,00	1.734.445.286,00	99,16	2.029.395.861,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.170.332.037,00	1.163.782.711,00	1.462.792.334,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.6 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	583.069.349,00	578.825.157,00	99,27	973.622.634,00
2	Tunjangan keluarga	67.302.462,00	66.757.014,00	99,19	762.238.700,00
3	Tunjangan jabatan	63.540.000,00	63.440.000,00	99,84	74.421.212,00
4	Tunjangan fungsional				
5	Tunjangan fungsional umum	12.385.000,00	12.310.000,00	99,39	15.910.000,00
6	Tunjangan beras	36.020.276,00	35.920.320,00	99,72	35.340.960,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.229.016,00	1.147.058,00	93,33	930.691,00
8	Pembulatan gaji	6.432,00	4.926,00	76,59	9.396,00
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	4.797.588,00	4.669.539,00	97,33	6.211.675,00
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	381.255.114,00	380.479.897,00	99,80	459.789.700,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.149.605.237,00	1.143.580.911,00	99,48	1.433.412.334,00
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	20.026.800,00	20.026.800,00	100,00	3.600.000,00
2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	175.000,00	25,00	25.780.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	20.726.800,00	20.201.800,00	97,47	29.380.000,00
	Jumah Belanja Pegawai	1.170.332.037,00	1.163.782.711,00	99,44	1.462.792.334,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	578.877.955,00	570.662.575,00	152.140.372,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	59.494.350,00	59.494.350,00	87.690.700,00
2	Belanja Jasa	463.990.200,00	455.916.921,00	445.378.172,00
3	Belanja Pemeliharaan	39.920.205,00	39.851.304,00	18.304.655,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.400.000,00	15.230.000,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	578.804.755,00	570.662.575,00	566.603.527,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja suku cadang kendaraan dinas, ATK, cetak/penggandaan, benda pos, makan minum rapat; dan belanja pakaian dinas/kerja/tradisional. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terrealisasi sebesar Rp 59.494.350,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.200.000,00	3.200.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.253.600,00	24.253.600,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.240.750,00	5.240.750,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.050.000,00	8.050.000,00
	Jumlah	59.494.350,00	59.494.350,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 445.916.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	95.400.000,00	95.400.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	272.700.000,00	272.700.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.500.000,00	13.500.000,00
4	Belanja Tagihan Air	1.053.000,00	832.400,00
5	Belanja Tagihan Listrik	19.583.200,00	18.228.631,00

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.840.000,00	9.814.250,00
7	Belanja Lembur	22.106.000,00	22.106.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.000.000,00	21.408.840,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.188.000,00	856.360,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.620.000,00	1.070.440,00
	Jumlah	463.990.200,00	455.916.921,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 39.851.304,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.10 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27.372.955,00	27.304.054,00
2	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.600.000,00	5.600.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.947.250,00	6.947.250,00
	Jumlah	39.920.205,00	39.851.304,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 15.400.000,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.11 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	3.800.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.400.000,00	10.400.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah	15.400.000,00	15.400.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.0,- (NIHIL) terinci sebagai berikut:

Tabel 3.12 : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021
	NIHIL		

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(c) Belanja Modal	0,00	0,00	0,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.11 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	N I H I L			
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah				

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel 3.12 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
Kas lainnya	0,00	0,00
Piutang pajak	0,00	0,00
Piutang retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	9.811.400,00	4.505.175,00
Jumlah	9.811.400,00	4.505.175,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.13 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2020		0,00
2. Penerimaan :		
- SP2D LS Gaji	1.143.580.911,00	
- SP2D LS Barang dan Jasa	403.008.840, 00	
- SP2D UP/GU	195.052.276, 00	
- Penerimaan Pajak	9.805.900, 00	
Jumlah Penerimaan		1.751.447.927, 00
3. Pengeluaran :		
- SPJ LS Gaji	1.143.580.911,00	
- SPJ LS Barang dan Jasa	403.008.840, 00	
- SPJ UP/GU	187.855.535, 00	
- Setor kembali sisa TUP	0, 00	
- Setor kembali sisa UP/GU	7.196.741,00	
- Pengeluaran Pajak	9.805.900, 00	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0, 00	
Jumlah pengeluaran		1.751.447.927, 00
4. Saldo 31 Desember 2020		0, 00

	31 Desember 2021	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 (NIHIL) Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 3.14 : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

Bulan	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei				
Juni		NIHIL		
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopember				
Desember				
Jumlah				

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e) Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2021 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15 : Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Dana BOS		
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai		
4	Belanja Barang dan Jasa		
5	- Belanja Persediaan		
6	- Belanja Jasa		
7	- Belanja Pemeliharaan	NIHIL	
8	- Belanja Perjalanan Dinas		
9	- Belanja Lainnya		
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)		
11	Belanja Modal		
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)		
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12)		
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu		
15	Pendapatan bunga bank		
16	Biaya admin bank		
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16)		

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Piutang Pajak	0,00	0,00

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut:

	31 Des. 2021 (Rp)	31 Des. 2020 (Rp)
Piutang pajak reklame		
Piutang pajak mineral bukan logam		
Piutang pajak restoran	NIHIL	
Piutang pajak hiburan		
Piutang pajak air tanah		
Piutang PBB P2		
Piutang pajak penerangan jalan		
Jumlah		

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
8) Persediaan	9.811.400,00	4.505.175,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.27 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		4.505.175,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		4.505.175,00
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2021	59.494.350,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja Persediaan BOS	0,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	59.494.350,00	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	0,00	
12	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0,00	
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan (9-13)		63.999.525,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		54.188.125,00
16	Persediaan tahun 2021 (3+14-15)		9.811.400,00

Tabel 3.28 Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

		dalam rupiah	
No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	9.811.400,00	4.505.175,00
	Jumlah	9.811.400,00	4.505.175,00

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	3.017.366.587,00	3.017.366.587,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.29 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	526.666.667,00	0,00	0,00	0,00	526.666.667,00
2	Peralatan dan Mesin	912.474.000,00	0,00	0,00	0,00	912.474.000,00
3	Gedung dan Bangunan	1.578.225.920,00	0,00	0,00	0,00	1.578.225.920,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.017.366.587,00	0,00	0,00	0,00	3.017.366.587,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 0,00 meliputi:

(1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp 0,00;

(3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp 0,00;

(7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(8) Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0,00.
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 0,00 meliputi:

(1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0,00;

(3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp 0,00;

(4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp 0,00; dan

(5) Mutasi keluar (*transfer out*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	526.666.667,00	526.666.667,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 526.666.667,00 dan Rp 526.666.667,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.30 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	526.666.667,00	-	-	-	526.666.667,00
	Jumlah	526.666.667,00	-	-	-	526.666.667,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	912.474.000,00	912.474.000,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 912.474.000,00 dan Rp 912.474.000,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.31 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	19.850.000,00	-	-	-	19.850.000,00
2	Alat-alat Angkutan	224.262.000,00	-	-	-	224.262.000,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	649.962.000,00	-	-	-	649.962.000,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	18.400.000,00	-	-	-	18.400.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-	-	-	-	-
	Jumlah	912.474.000,00	-	-	-	912.474.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.578.225.920,00	1.578.225.920,00

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minuman. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.32 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.578.225.920,00	-	-	-	1.578.225.920,00
2	Monumen	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.578.225.920,00	-	-	-	1.578.225.920,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.33 Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Jalan					
2	Jembatan					
3	Bangunan Air/Irigasi					
4	Instalasi					
5	Jaringan					
	Jumlah					

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0, 00 dan Rp 0, 00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 3.34 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan					
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
3	Hewan Ternak dan Tanaman					
	Jumlah					

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0, 00 dan Rp 0, 00Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 3.35 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
	Jumlah					

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Lainnya	17.440.000,00	17.440.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 17.440.000 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.440.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.36 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
4	Aset Lain lain	17.440.000,00	-	-	17.440.000,00
	Jumlah	17.440.000,00	-	-	17.440.000,00

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rpxxxxxxx dan Rpxxxxxxx diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	37.971.063,00	35.655.972,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 37.971.063,00 dan Rp 35.655.972,00 Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang PFK	0,00	0,00

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 utang PFK masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.37 Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021

dalam rupiah					
No	Jenis	31 Desember 2020	Pungutan	Penyetoran	31 Desember 2021
1	PPh ps21				
2	PPh. Ps. 22				
3	PPN				
4	dtb				
	Jumlah				

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 (NIHIL) yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel 3.38 Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2021
1	Pendapatan Sewa	NIHIL			
2	Parkir berlangganan				
3	dll				
	Jumlah				

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	0,00	0,00

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rp 0,00 (NIHIL) merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rp 0,00 (NIHIL) merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang Dana Desa sebesar Rp 0,00 (NIHIL), merupakan Dana Desa tahun 2021 yang belum disalurkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 0,00 (NIHIL) dan jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rp 0,00 (NIHIL)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Utang Belanja	37.971.063,00	35.655.972,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 37.971.063,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 35.333.673,00 utang belanja jasa Rp 2.637.390,00 dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 0,00 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.39 Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	32.915.345,00	35.333.673,00	32.915.345,00	35.333.673,00
2	Utang Belanja Jasa	2.740.627,00	2.637.390,00	2.740.627,00	2.637.390,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	35.655.972,00	37.971.063,00	35.655.972,00	37.971.063,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.333.673,00 merupakan kewajiban atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) PNS yang belum dibayar belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 3.40 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP)	32.915.345,00	35.333.673,00	32.915.345,00	35.333.673,00
	Jumlah	32.915.345,00	35.333.673,00	32.915.345,00	35.333.673,00

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.637.390,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, air PDAM, dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.41 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa Air/PDAM	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	Jasa Listrik	1.999.327,00	1.574.590,00	1.999.327,00	1.574.590,00
3	Jasa Internet	712.000,00	1.033.500,00	712.000,00	1.033.500,00
	Jumlah	2.740.627,00	2.637.390,00	2.740.627,00	2.637.390,00

e. EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Ekuitas	1.979.420.364,92	2.064.791.203,33

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.42 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	2.017.391.427,92	2.100.447.175,33
2	Jumlah Kewajiban	37.971.063,00	35.655.972,00
3	Ekuitas (3 = 1-2)	1.979.420.364,92	2.064.791.203,33

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 3.45 Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	2021	2021
1	EKUITAS AWAL	2.064.791.203,33	2.153.991.669,74
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	RK - PPKD	1.734.445.286,00	2.029.395.861,00
8	EKUITAS AKHIR	1.979.420.364,92	2.064.791.203,33

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	0,00	0,00

Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.46 Daftar Pendapatan Pajak Daerah LO Per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah						
No	Nama Akun	Pendapatan Pajak LRA	Pajak 2021 Belum Diterima	Penerimaan Piutang Tahun Lalu	Pendapatan Pajak LO	Pendapatan Pajak LO
1	Pajak Hotel					
2	Pajak Restoran					
3	Pajak Hiburan					
4	Pajak Reklame					
5	Pajak Penerangan Jalan		NIHIL			
6	Pajak Parkir					
7	Pajak Air Tanah					
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					
Jumlah Pendapatan Pajak						

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) Pendapatan Retribusi Daerah LO	0,00	0,00

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.47 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Nama Akun	2021	2020
1	Retribusi Jasa Umum-LO		
	Retribusi pelayanan kesehatan-LO		
	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan-LO		
	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO		
	Retribusi pelayanan pasar-LO		
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO		
	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi-LO	NIHIL	NIHIL
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang		
2	Retribusi Jasa Usaha-LO		
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO		
	Retribusi terminal-LO		

No	Nama Akun	2021	2020
	Retribusi tempat khusus parkir-LO		
	Retribusi rumah potong hewan-LO		
	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO		
	Retribusi sewa gedung ruangan aula		
3	Retribusi Perijinan Tertentu-LO		
	Retribusi ijin mendirikan bangunan-LO		
	Retribusi ijin gangguan/keramaian-LO		
	Retribusi ijin trayek-LO		
	Jumlah		

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.48 Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penerimaan dividen dari PT. Bank Jatim, Tbk.		
2	Penerimaan dividen dari PT. BPR Jatim		
	Jumlah Pendapatan LRA		
3	Laba (Rugi) PD. BPR Bank Pasar Tahun 2020 dan 2020 (kepemilikan 100%)	NIHIL	
4	Laba (rugi) PD. Semeru Tahun 2020 dan 2020 (kepemilikan 100%)		
5	Laba (rugi) PDAM Tahun 2020 dan 2020 (kepemilikan 100%)		
	Jumlah Pendapatan LO		

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang menjadi hak Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.49 Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Per 31 Desember 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Nama Akun	2021	2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO		
	Penjualan drum bekas		
	Penjualan hasil penebangan pohon		
	Penjualan hasil pertanian		
	Penjualan hasil perkebunan		
	Penjualan hasil perikanan		
2	Penerimaan Jasa Giro		
	Jasa giro kas daerah		
	Jasa giro bendahara		
	Jasa giro pengeluaran daerah	NIHIL	
	Jasa giro penerimaan daerah		
	Jasa giro rekeening dana BOS		
	Jasa giro rekening Dana Cadangan		
3	Pendapatan Bunga Deposito		
	Rekening deposito pada Bank Jatim		
	Rekening deposito pada Bank Mandiri		
	Rekening deposito pada Bank BRI		

No	Nama Akun	2021	2020
	Rekening deposito pada Bank BNI		
	Deposito dana cadangan		
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
	Kerugian uang		
	Kerugian barang daerah		
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
	Bidang kesehatan		
	Bidang pekerjaan umum		
	Bidang Pendidikan		
6	Pendapatan Denda Pajak		
	Pendapatan Denda Pajak Hotel		
	Pendapatan denda pajak restoran		
	Pendapatan denda pajak reklame		
	Pendapatan denda pajak parkir		
	Pendapatan denda pajak air bawah tanah		
	Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan		
	Pendapatan denda pajak mineral bukan logam		
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
	Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan		
8	Pendapatan dari Pengembalian		
	Penerimaan kembali belanja tahun lalu		
	Penerimaan pendapatan dari pengembalian belanja gaji-LO		
9	Sumbangan Pihak Ke III – LO		
	Sumbangan rekanan, pengusaha lainnya		
	Pendapatan dari sumbangan Petani Tebu		
10	Pendapatan dari BLUD		
	Pendapatan dari BLUD RSD Dr. Haryoto	NIHIL	
	Pendapatan dari BLUD Akper Pemkab Lumajang		
	Penerimaan Lainnya		
11	Pendapatan Sewa-LO		
	Pendapatan Sewa Tanah		
	Pendapatan Sewa Bangunan		
12	Pendapatan dari Siaran		
	Pendapatan dari siaran radio		
13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tempursari-LO		
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pronojiwo-LO		
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Candipuro-LO		
	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penanggal-LO		
	Pendapatan denda sewa rusunawa		
15	Lain-lain pendapatan		
	Penerimaan Lain-lain		
16	Pendapatan bunga BOS		
	Jumlah		

Tabel 3.50 Hubungan Lain-lain PAD yang sah LRA dan LO tahun 2021

dalam rupiah

Uraian	Jumlah (Rp)	
Lain-lain PAD yang Sah LRA		
DITAMBAH :		
b. Jasa giro dana cadangan		
c. Deposito Dana Cadangan		
d. Penambahan piutang Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan (RSUD dr. Haryoto)		
e. Pengakuan Pendapatan BLUD atas pendapatan diterima dimuka tahun 2020	NIHIL	
f. Pendapatan BLUD 2020 belum diterima		
g. Pendapatan Diterima dimuka IPP 2020 yang sudah jadi hak di tahun 2020 (Akper)		

Uraian	Jumlah (Rp)	
h. Pendapatan tahun 2020 belum diterima (AKPER)		
i. Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah / tebu 2016 yang sudah jadi hak tahun 2020 (Bag. Tapem)		
j. Pendapatan Diterima Dimuka Atas Sewa 2 Bidang Tanah Tahun 2020 Sudah Menjadi Hak di Tahun 2020 (Dinas Pertanian)		
Jumlah Penambahan		
DIKURANGI :		
1) Penerimaan Piutang BLUD tahun lalu (2020)		
2) Pendapatan LRA 2020 (BLUD) perupakan pend diterima dimuka		
3) Pendapatan dana BOS di reklasifikasi ke Pendapatan Hibah		
4) Pendapatan sewa tanah 2020 diterima dimuka (BPKD)		
5) Pendapatan sewa tanah 2020 diterima dimuka (Bag. Tapem)		
6) Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Perdagangan)		
7) Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (RSU Pasiririan)		
8) Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Pariwisata)		
9) Pendapatan di terima dimuka atas sewa tanah 2020 (Dinas Pertanian)		
Jumlah Pengurangan		
Lain-lain PAD Yang Sah - LO		

NIHIL

2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00

Pendapatan hibah tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 sebagai berikut.

Tabel 3.51 Daftar Pendapatan Hibah – LRA dan LO Tahun 2021

dalam rupiah		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Hibah LRA	
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan	
	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan	
	Jumlah Pendapatan LRA	
2	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	
	Hibah dari pemerintah pusat	
	Hibah dari Pemerintah Propinsi	
	Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta	
	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
3	Jumlah Pendapatan Hibah LO	

NIHIL

Tabel 1.52 Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah				
No	Keterangan	SKPD	2021	2020
1	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perkotaan	BPKD		
2	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk air minum perdesaan	BPKD		
3	Hibah barang (aset tetap) dari BNPB	BPBD		
4	Hibah barang (aset tetap) truck tinja dari Ditjen. Cipta Karya, Kementerian PU	DLH		
5	Hibah barang (aset tetap) dari Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	Dinas Kearsipan & Perpustakaan		
6	Hibah barang (aset tetap) Kendaraan ambulan dari Kemnterian Kesehatan	Dinas Kesehatan		
7	Hibah Barang Blockgrant (APBN)	Dinas Pendidikan		
8	Hibah Barang Alokon dari Provinsi	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan		
9	Hibah Barang vaksin dari dinkes propinsi	Dinas Kesehatan		
10	Hibah obat dari Dinkes Propinsi	Farmasi		
11	Hibah Dana BOS	Dinas Pendidikan		

NIHIL

No	Keterangan	SKPD	2021	2020
12	Hibah barang (aset tetap) alat-alat bengkel dari Propinsi	Dinas Perdagangan		
13	Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi	Puskesmas PASIRIAN		
14	Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi	Puskesmas PADANG		
15	Hibah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinkes Propinsi	Puskesmas KEDUNGJAJANG		
	Jumlah			

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b) Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00

Pendapatan lainnya yang diterima Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.53 Daftar Pendapatan Lainnya Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Bantuan keuangan peningkatan pendidikan-LO	NIHIL	
2	Bantuan keuangan peningkatan pelayanan kesehatan		
3	Bantuan keuangan peringatan hari jadi Prop. Jatim		
4	Bantuan Keuangan Program Jalin Matra		
5	Sumbangan Pihak ke tiga		
6	Pendapatan Lain-lain		
	Jumlah		

b. BEBAN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.166.201.039,00	1.454.270.466,00

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.52 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Uraian	2021	2020
Belanja Gaji Pegawai LRA	1.070.083.556,00	1.462.792.334,00
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2020 belum dibayar	0,00	32.915.345,00
Tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2021 belum dibayar	35.333.673,00	0,00
DIKURANGI :		
Pembayaran Tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2019	0,00	(41.437.213,00)
Pembayaran Tambahan perbaikan penghasilan (TPP) bulan Desember 2020	(32.915.345,00)	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Lo	1.166.201.039,00	1.454.270.466,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	565.253.113,00	570.842.889,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.53 Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	54.188.125,00	92.067.175,00
2	Beban Jasa	455.813.684,00	445.241.059,00
3	Beban Pemeliharaan	39.851.304,00	18.304.655,00
4	Beban Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.230.000,00
5	Beban Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	565.253.113,00	570.842.889,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Beban Persediaan	54.188.125,00	92.067.175,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.54 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021

Keterangan		2021	
dalam rupiah			
1. Belanja Persediaan LRA			59 494 350,00
Ditambah			
2. Persediaan Awal per 31 Desember 2020	4.505.175,00		
3. Koreksi persediaan awal	-		
4. Hibah persediaan obat dari Pemerintah Provinsi	-		
5. Reklasifikasi Belanja Modal BOS menambah persediaan	-		
6. Koreksi persd. Suku cadang puskesmas senduro	-		
7. Beban persediaan 2017 yang masih harus di bayar	-		
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)			4.505.175,00
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)			63.999.525,00
Dikurangi			
10. Utang beban persedian tidak menambah persediaan (RSUD)	-		
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	9.811.400,00		
12. Reklasifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	-		
13. Reklasifikasi beban persediaan ke baban hibah (gazebo) pariwisata	-		
14. Penerimaan hibah PMT Pusk. Gucialit di catat terlalu tinggi	-		
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu	-		
16. Hibah persediaan ke luar	-		
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)			9.811.400,00
18. Beban Persediaan (9(17))			54.188.125,00

Tabel 3.55 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban alat tulis kantor	18.947.375,00	41.532.075,00
2	Beban alat listrik dan elektronik	-	3.454.000,00
3	Beban Perangko, materai, dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	7.106.100,00
5	Beban cetak dan penggandaan	5.240.750,00	1.450.000,00
6	Beban makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	17.775.000,00
7	Beban Pakaian kegiatan tertentu	8.050.00,00	20.000.000,00
9	Beban Suku Cadang Kend. Dinas Ops	3.200.000,00	-
	Jumlah Beban Persediaan	54.188.125,00	92.067.175,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	455.813.684,00	445.241.059,00

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 445.813.684,00 dan Rp 445.241.059,00.

Tabel 3.56 Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Jasa Kantor	-	31.292.545,00
2	Beban Dekorasi	-	83.500,00
3	Beban Penggantian Transport	-	13.200.000,00
4	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan	-	21.045.014,00
5	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	-	379.200.000,00
6	Beban tambahan upah/ongkos tenaga kerja bulanan	-	420.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	95.400.000,00	-
8	Beban Jasa Tenaga Administrasi	272.700.000,00	-
9	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	13.500.000,00	-
10	Beban Tagihan Air	832.400,00	-
11	Beban Tagihan Listrik	17.803.894,00	-
12	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.135.750,00	-
13	Beban Lembur	22.106.000,00	-
14	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.408.840,00	-
15	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	856.360,00	-
16	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.070.440,00	-
	Jumlah	455.813.684,00	445.241.059,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	39.851.304,00	18.304.655,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 39.851.304,00 dan Rp 18.304.655,00

Tabel 3.57 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	27.304.054,00	14.079.655,00
2	Beban Pemeliharaan Komputer	5.600.000,00	4.225.000,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	6.947.250,00	0,00
	Jumlah	39.851.304,00	18.304.655,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.230.000,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 3.58 Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Beban Perjalanan Dinas	2021	2020
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	13.480.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	0,00	1.750.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.400.000,00	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.200.000,00	0,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	15.400.000,00	15.230.000,00

Tabel 3.59 Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

dalam rupiah					
No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2021 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2021	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.400.000,00	-	-	10.400.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.200.000,00			1.200.000,00
	Jumlah	15.400.000,00	-	-	15.400.000,00

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(e) Beban Lainnya	0,00	0,00

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 sebagai berikut.

Tabel 3.60 Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LO Tahun 2021

dalam rupiah

Uraian	Jumlah	
BELANJA LAINNYA – LRA		
PENAMBAHAN:		
	NIHIL	
PENGURANGAN :		
BEBAN LAINNYA LO		

Tabel 3.61 Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel) Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	2021	2020
1	Belanja Meubelair	NIHIL	-
2	Belanja Home use		-
	JUMLAH		-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	88.361.972,41	93.482.972,41

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 88.361.972,41 dan Rp 93.482.972,41 sebagai berikut.

Tabel 3.62 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56.294.500,00	61.415.500,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.067.472,41	32.067.472,41
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	88.361.972,41	93.482.972,41
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
	Jumlah	88.361.972,41	93.482.972,41

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Surplus (Defisit) LO	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.67 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)
2	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasi	-	-
3	Pos Luar Biasa	-	-
	Jumlah	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Ekuitas Awal	2.064.791.203,33	2.153.991.669,74

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 2.064.791.203,33 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 2.153.991.669,74 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 3.68 Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah			
No	Uraian	2020	2020
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	1.819.816.124,41	2.118.596.327,41
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00

Pada Tahun 2021 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2020 yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp 0,00 (NIHIL).

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	1.979.420.364,92	2.064.791.203,33

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar serta RK PPKD periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.69 Laporan Perubahan Ekuitas

		dalam rupiah	
No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	2.064.791.203,33	2.153.991.669,74
2	Surplus (defisit) LO	(1.819.816.124,41)	(2.118.596.327,41)
3	Dampak Kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar	0,00	0,00
4	RK PPKD	1.734.445.286,00	2.029.395.861,00
4	Ekuitas Akhir	1.979.420.364,92	2.064.791.203,33

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Kecamatan Sukodono tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasi pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang Kecamatan Sukodono tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.